

# Strategi dan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah dalam RPJMN 2025-2029

27 Agustus 2025

DIREKTORAT PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS





Kementerian PPN/  
Bappenas



# Visi Persampahan 2045 dan Target RPJMN 2025-2029

## VISI PERSAMPAHAN 2045

Pengelolaan persampahan yang TERPADU dan BERWAWASAN LINGKUNGAN dengan memenuhi asas tanggung jawab, manfaat, keadilan, kesadaran, kebencanaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi

### Target Pengelolaan Sampah 2045



**100% Rumah Tangga Mendapatkan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**

(SEB Pedoman Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045)



**90% Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**

Terdiri dari:



**35% Sampah Terdaur Ulang**



**55% Pengolahan sampah (material & energy recovery)**



**10% Sampah Residu Tersisa di LUR**



**85% Rumah Tangga Mendapatkan Layanan Pengumpulan Sampah**



**38% Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**

Terdiri dari:



**20% Sampah Terdaur Ulang**



**18% Pengolahan sampah (material & energy recovery)**

### Target RPJMN 2025-2029

### Outcome Yang Diharapkan



**Kesehatan masyarakat yang meningkat**



**Kualitas lingkungan hidup yang lestari**








**Sampah termanfaatkan menjadi sumber daya dan dikelola secara berkelanjutan**

Pemenuhan output dan outcome sektor persampahan tentu memerlukan dukungan dari **sektor Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Tata Kelola Kelembagaan di Hulu**, yaitu melalui perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan yang bergerak di Hulu



# Proyeksi Target Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Indikator	Baseline (2022)	Target (2025)	Target (2026)	Target (2027)	Target (2028)	Target (2029)	Target (2045)
 <b>Layanan Pengumpulan Sampah di Rumah Tangga</b>	35%	56%	64%	71%	78%	85%	100% <small>(Layanan Pengumpulan Penuh)</small>
 <b>Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah</b>	15%	24%	28%	31%	34%	38%	90%
<i>Termasuk di dalamnya:</i>							
 <b>Persentase Sampah Terdaur Ulang</b>	13%	16%	17%	18%	19%	20%	35%
 <b>Persentase Sampah Terbuang ke Lingkungan</b>	23%	20%	19%	18%	17%	16%	0%
 <b>Persentase Residu Tersisa di LUR</b>	63%	56%	53%	51%	49%	47%	10%

Catatan: Satuan untuk seluruh indikator adalah persentase dalam tonase kecuali indikator layanan pengumpulan sampah di rumah tangga

## REALITA DI LAPANGAN



**93,2 % Rumah Tangga** belum melakukan pemilahan sampah dan belum semua rumah tangga memiliki tempat sampah\*



**35% Rumah Tangga** yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah dan kendaraan pengumpulan tidak sesuai dengan standar\*



**Lebih dari 40% TPA** masih melakukan metode pembuangan terbuka (open dumping)\*\*

Sumber Data:

\*Susenas MKP (2022)

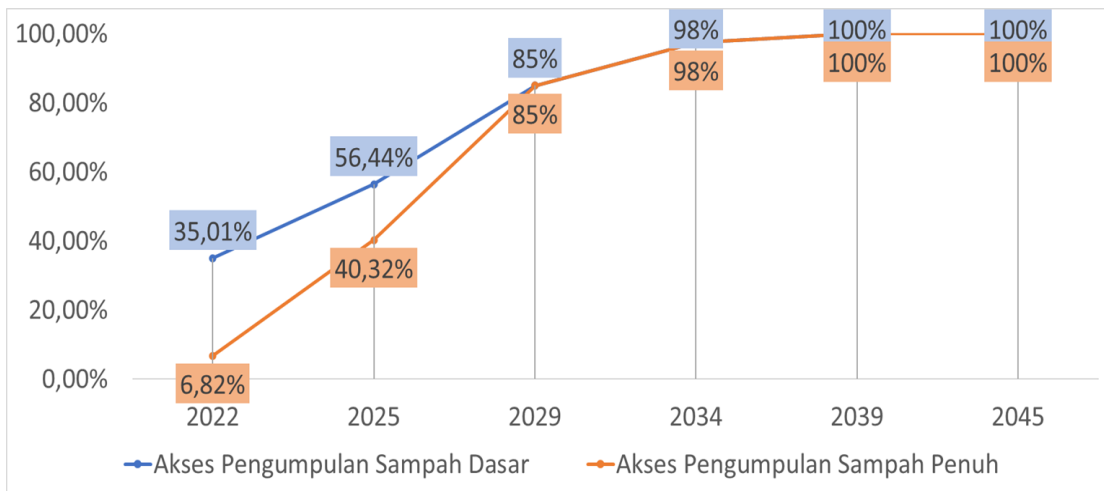
\*\*Hasil Pemantauan Fisik Adipura, 2016-2019, KLHK



# Peta Jalan Persampahan Hingga Tahun 2045

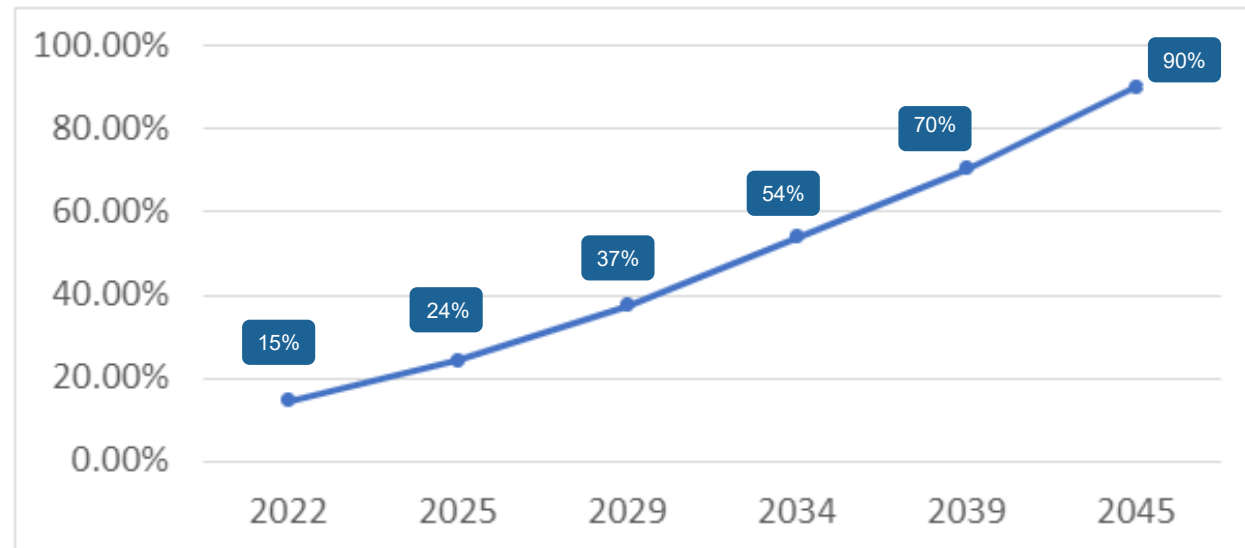
## Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)

Rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) dan dikumpulkan dalam 3 (tiga) atau lebih jenis yang terpisah (contoh: basah (organik), daur ulang, dan residu) dengan syarat: (1) dari pintu ke pintu; atau (2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan.



## Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut: TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.



Terdapat 2 (dua) indikator pembangunan sektor persampahan yang diselaraskan dari pusat hingga daerah dalam dokumen perencanaan hingga 20 tahun ke depan dengan target nasional pada tahun 2045 adalah **100% RT mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah** dan **90% sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah**, artinya hanya 10% sampah yang menjadi residu dan masuk ke TPA.



Kementerian PPN/  
Bappenas



# Arah Kebijakan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

RPJPN 2025-2045



Agenda Pembangunan 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi  
IE 15: Lingkungan Hidup yang Berkualitas

RPJMN 2025-2029



Prioritas Nasional 2:  
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembad Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia dilaksanakan melalui salah satunya Program Pembangunan **Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir:**



*Pengelolaan sampah harus menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didukung dengan penguatan kebijakan, perbaikan dalam tata kelola, kinerja kelembagaan dan keuangan daerah, serta komitmen kepala daerah, diawali dengan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang komprehensif dan layak secara finansial, pemisahan operator dan regulator, penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan standar tipping fee.*



*Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemecuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, dan serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah.*



*Penerapan reformasi harus menjadi indikator kunci kinerja kepala daerah sehingga penataan fungsi dan peningkatan kapasitas perencanaan, regulator, operator, pengawasan, dan penegakan hukum berjalan seimbang dan optimal*



*Reformasi juga dilakukan melalui penyediaan insentif dan disinsentif berbasis kinerja serta pendanaan inovatif baik bagi pemerintah daerah dan pelaku lainnya. Penguatan kinerja kepala daerah dan perangkatnya juga perlu diatur, dibina, dan diawasi oleh pemerintah provinsi.*



*Polluter pay principle perlu ditegakkan melalui penerapan retribusi persampahan yang berkeadilan. Biaya pengelolaan sampah juga bisa dimasukkan sebagai tambahan komponen pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu alternatif penerapan prinsip ini.*



*Pemastian kelengkapan regulasi dan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk batas aman kesehatan dan lingkungan diperlukan untuk seluruh upaya pengelolaan sampah.*



*Pengelolaan aset dilakukan baik pada proses pengadaan barang, transfer, serta penataan aset di pusat dan daerah.*



*Sebagai upaya penurunan sampah yang mencemari laut dan perairan, sarana dan prasarana penanganan sampah perairan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan persampahan land-based. di daerah akan ditingkatkan.*



*Reformasi dilakukan melalui (a) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, dan (b) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR.*



Kementerian PPN/  
Bappenas



# NEGLECTED ISSUE dalam Pengelolaan Sampah (Blank Spot)

## Kondisi Ideal

Pemilahan dan Pewadahan  
sesuai Standar di Rumah Tangga



Pengumpulan sampah dari sumber  
(terpilah dan/atau terjadwal)



Pengumpulan



Infrastruktur  
Pengelolaan Sampah di  
Hulu  
(TPS 3R dan Bank Sampah)

Rumah Tangga

Kondisi Rumah Tangga  
Tidak Mendapatkan  
Layanan Pengumpulan

Isu pada Rumah Tangga:

Isu pada Pengumpulan:

**Belum** seluruh rumah  
tangga **memiliki**  
tempat sampah/bin



Pemilahan  
sampah **belum**  
**terjadi** secara  
masif



Pengumpulan sampah **belum terpilah atau terjadwal**

Capaian pengumpulan sampah nasional tahun 2022 baru mencapai **35%**  
(Sumber: SUSENAS MKP, 2022)



Kendaraan pengumpulan  
**masih** mengangkut sampah  
yang **tercampur dan tanpa**  
**sertifikat khusus pengemudi**

Pada salah satu kab/kota kualifikasi  
supir truk pengumpulan sampah  
hanya wajib memiliki SIM B  
(Sumber: Hasil Monev Bappenas, 2024)



**3 dari 4**  
rumah tangga  
desil 1-4 tidak  
mendapat  
layanan  
persampahan\*

\*) Sumber: BPS, Susenas MKP, 2022

Masyarakat miskin rentan dengan risiko  
kesehatan akibat paparan polusi dan bahan  
berbahaya dari pembakaran sampah dan  
pembuangan terbuka di lahan kosong, sungai,  
dan laut.



Munculnya **TPS liar**  
akibat pengumpulan  
tidak maksimal

Berdampak  
kepada

**Komposisi Sampah  
Perairan Indonesia**

**44% Organik**  
**31% Plastik**  
**21% Popok**  
**4% Gelas dan Logam**

Sumber: Bank Dunia (2021), Laut untuk  
Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru  
di Indonesia. Bank Dunia, Washington, D.C.

**Mayoritas** tempat sampah  
eksisting **belum** sesuai  
standar



Penarikan retribusi yang  
**masih rendah**

Hanya **40% - 45%**  
persentase pengumpulan retribusi  
pengelolaan sampah

(Sumber: Data Pengumpulan Retribusi Pengelolaan  
Sampah, Kemendagri, 2019)



Biaya bahan bakar  
truk angkut yang  
**mahal**

Berdasarkan hasil monev Bappenas di Jawa  
Barat (2023), estimasi kebutuhan BBM sebanyak  
**50.000 liter/bulan** sehingga kebutuhan biaya  
bahan bakar mencapai **Rp340 juta/bulan**

**4 Hal  
Kunci**

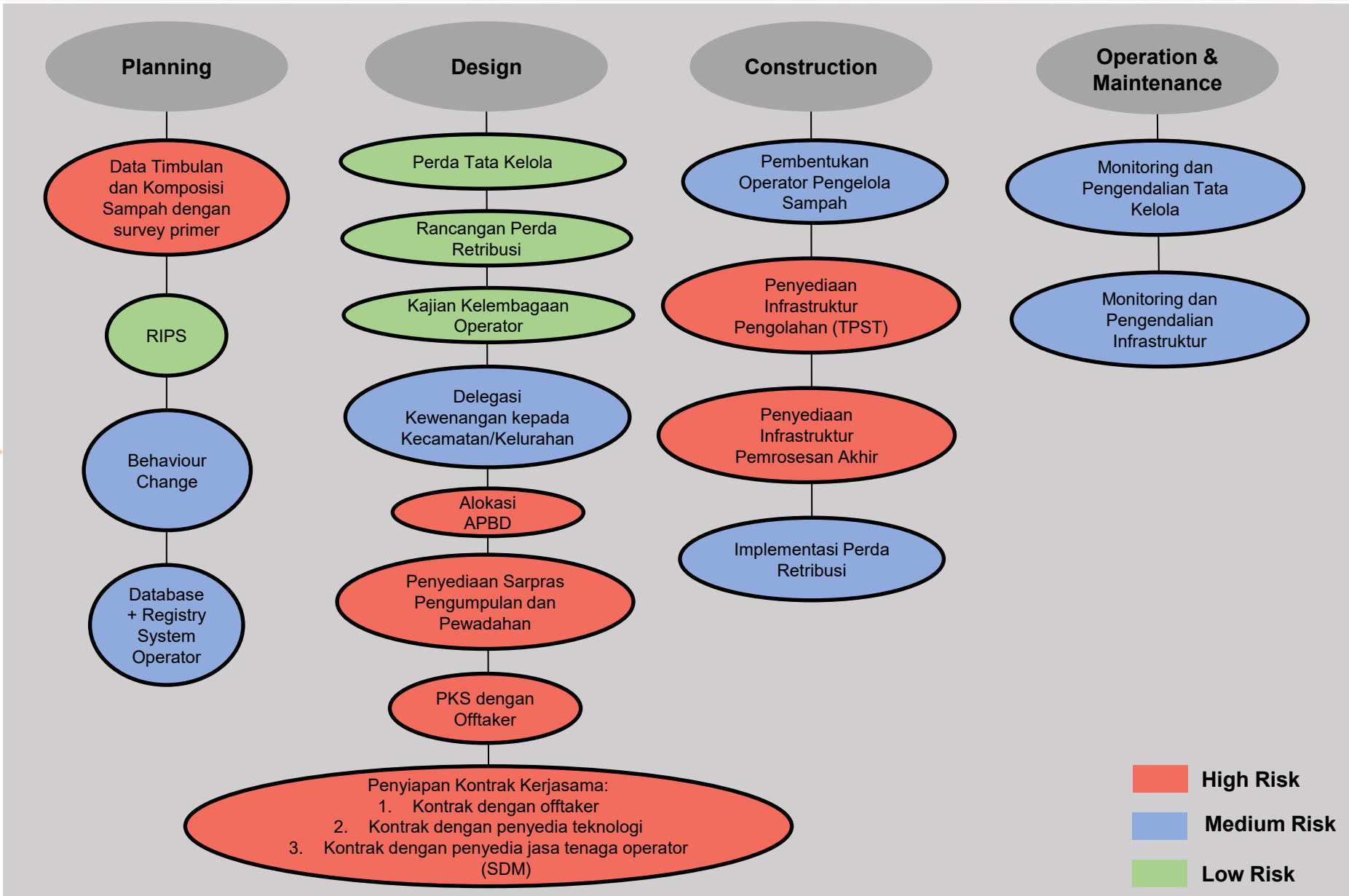
1. **Perubahan Perilaku**
2. **Pengumpulan**
3. **Retribusi/iuran**
4. **PBB-P2**

**Perubahan perilaku** merupakan faktor yang memiliki **korelasi yang kuat** terhadap pengelolaan sampah di hulu yaitu **pemilahan dan pengurangan**.  
Pemilahan tersebut juga harus **konsisten** didukung dengan sistem **pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan** yang sesuai dengan jenis sampah.



# Theory of Change (ToC) Program Pengelolaan Sampah ke Depan

Dokumen Feasibility Study



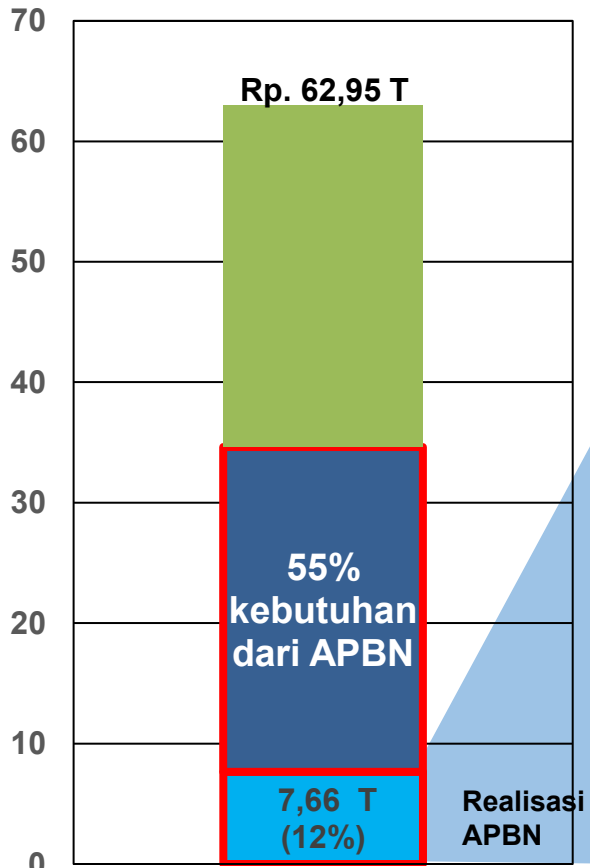
### Keterangan:

Dalam siklus program pengelolaan sampah ke depan, fokus awal yang diperlukan adalah terkait dengan **perbaikan tata kelola serta pengumpulan sampah** bagi Pemerintah Daerah sebagai strategi awal dalam memperbaiki pengelolaan sampahnya serta **pengawasan pasca pembangunan** sehingga dalam implementasi program, akan diawali dengan intervensi nonfisik terlebih dahulu sebelum intervensi fisik dilakukan.

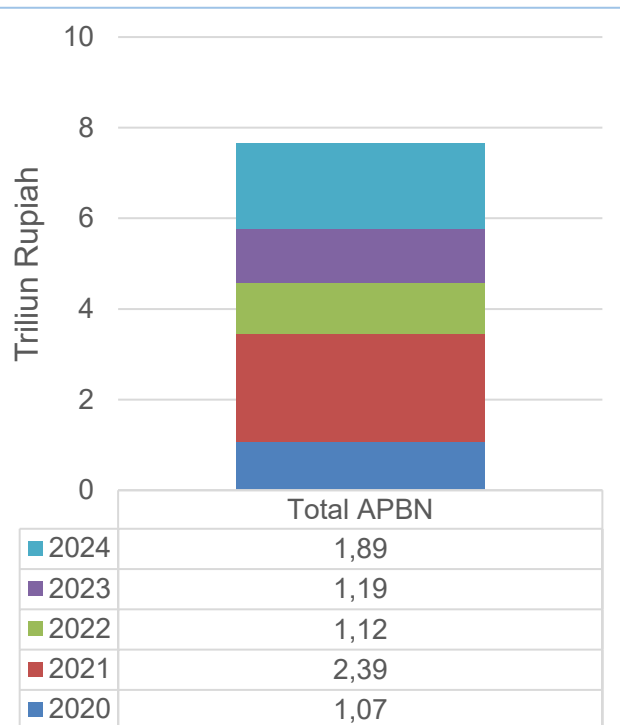


# Tantangan Pembiayaan Persampahan

Total Kebutuhan Pendanaan Persampahan dalam RPJMN 2020-2024: Rp 62,95 T



Dari total kebutuhan pendanaan persampahan dalam RPJMN 2020-2024, pendanaan APBN K/L dari PUPR dan KLHK **hanya mencapai 12% (Rp 7,66 T)** dibandingkan target 55% APBN. (Belum termasuk realisasi DAK)



■ Realisasi APBN     ■ Target APBN  
■ APBD dan lainnya

Alokasi APBD Persampahan Kab/Kota terhadap Total APBD 2023

	Total Alokasi APBD Persampahan 2023	Total APBD 2023
Rp/tahun	5,59 Triliun (0,65%)	872,7 Triliun
Rp / kapita / tahun	19.936	-
Rp / kapita / bulan	1.661	-

Sumber: Kemendagri, 2024

- Sampah bukan bagian dari SPM yang ditetapkan dalam UU23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga komitmen politik untuk anggaran persampahan masih rendah.
- Rata-rata alokasi untuk pengelolaan sampah 2023 adalah **Rp 19.936** perkapita pertahun, alokasi tersebut sangat rendah dibandingkan dengan *benchmark* internasional yaitu sekitar **Rp 325.102** per kapita per tahun.

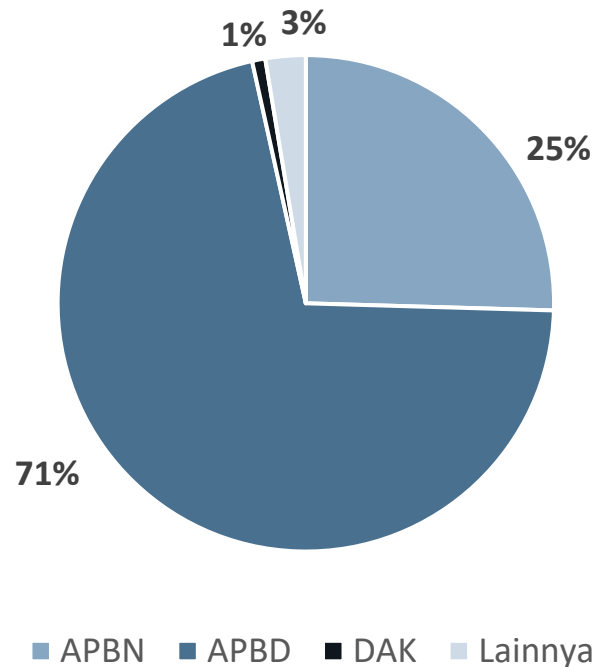
Masih terdapat gap cukup tinggi antara alokasi APBD terhadap kebutuhan biaya persampahan (studi di 60 kab/kota)

	Alokasi APBD Persampahan		Kebutuhan Biaya Permendagri 7/2021
	Studi FITRA Indonesia	Global Benchmark	
Rp / kapita / tahun	29.211*	325.102**	396.648^
Rp / kapita / bulan	2.434	27.092	33.054

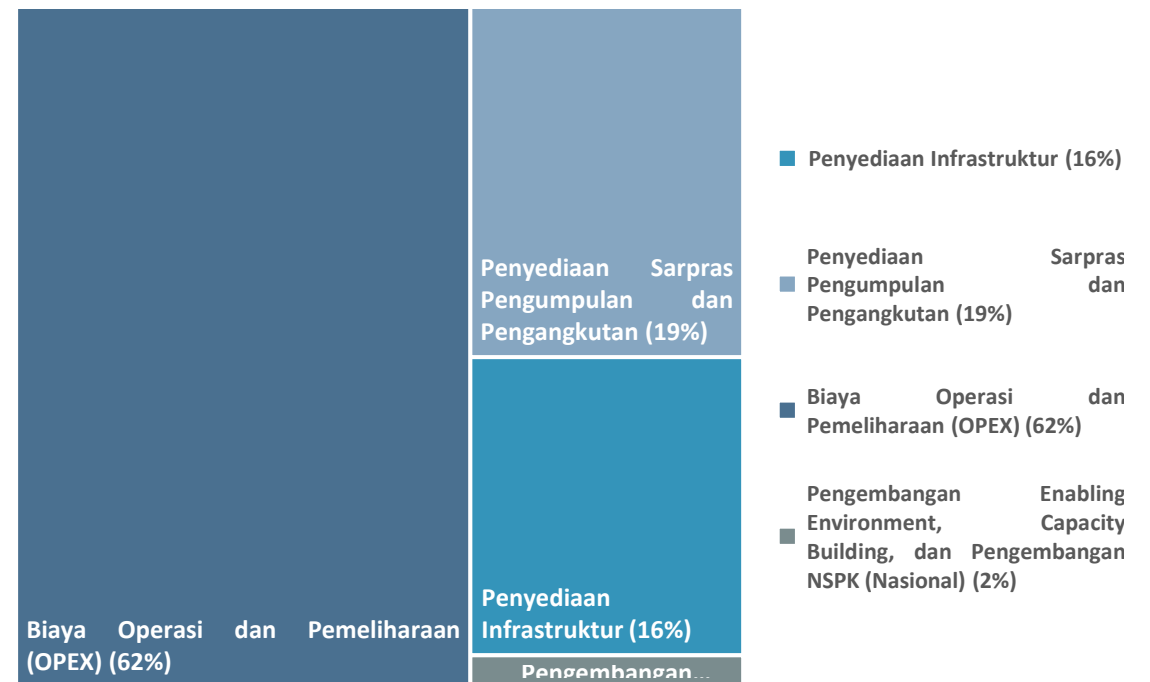
\*Penganggaran dan Kebijakan dalam Manajemen Pengelolaan Sampah, FITRA, 2020  
 \*\*Laporan Sintesis, World Bank, 2018  
 ^ diolah merujuk Permendagri 7/2021



## KOMPOSISI SUMBER DANA



## KEBUTUHAN PENDANAAN PER KEGIATAN



Total Kebutuhan Pendanaan: **Rp254,185 Triliun**

Catatan:

- Penyediaan infrastruktur meliputi pembangunan dan optimalisasi untuk: **TPS3R, TPST, TPA/LUR, dan Bank Sampah**
- Penyediaan sarpras pengumpulan dan pengangkutan meliputi: **Gerobak Sampah, Motor Sampah, Truk Pickup, Armroll, dan Compactor**
- Kebutuhan pembiayaan nonfisik meliputi: **Biaya OPEX, Pengembangan Enabling Environment, Capacity Building, dan Pengembangan NSPK**

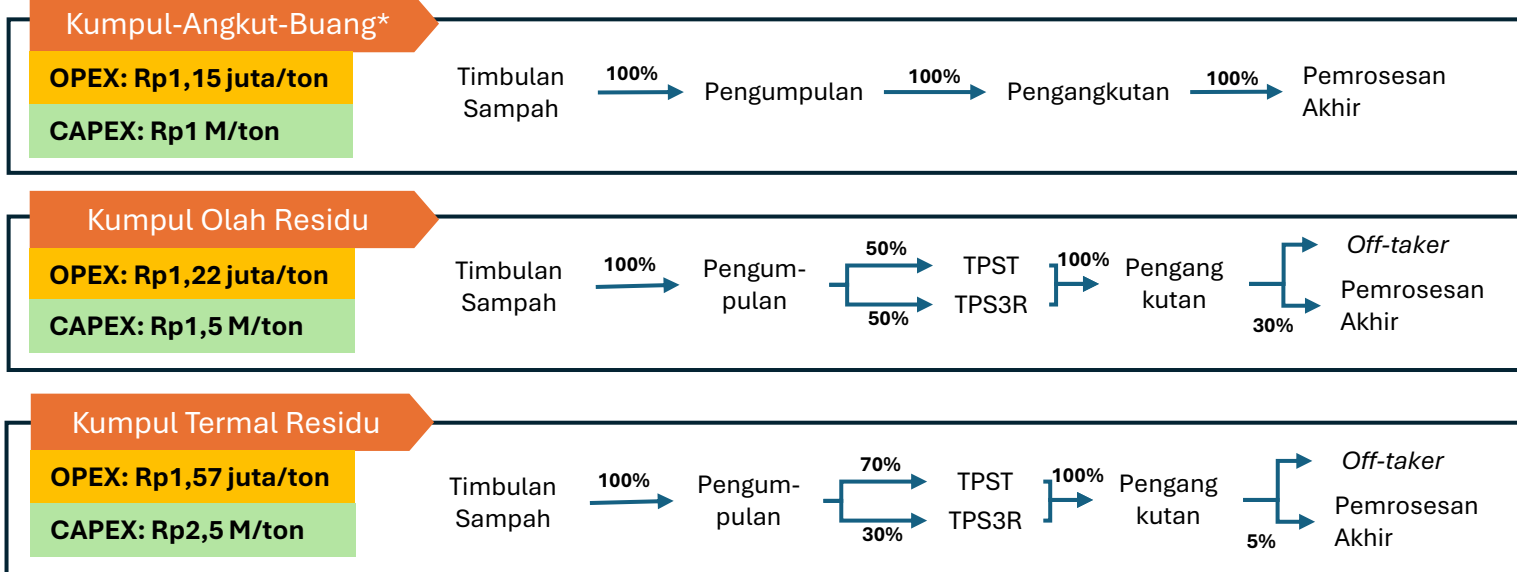


## Asumsi Yang Digunakan

Data	Satuan	Unit
Satuan KK	Orang/ KK	4
Timbulan Sampah *)	Kg/Kapita/Hari	0,74
	Kg/KK/Hari	3
% Cost Recovery (Penjualan Produk)	% Dari OPEX Pengolahan (TPS3R/TPST)	70%
<b>Harga Satuan OPEX Peremendagri 7/2021</b>		
Pengumpulan	Rp/Ton	327.000
Pengangkutan	Rp/Ton	371.000
TPS3R	Rp/Ton	526.000
TPST Mekanis & Biologis	Rp/Ton	244.000
TPST Termal	Rp/Ton	987.000
Pemrosesan Akhir	Rp/Ton	449.000

\*) Trends in Solid Waste Management, World Bank, 2012  
(Proposi Timbulan Sampah /Neraca Massa)

## Asumsi Neraca Massa Skema Layanan (*end to end*)



Kebutuhan per Rumah Tangga per Bulan (Rupiah)	Kumpul-Angkut-Buang*	Kumpul-Olah-Residu	Kumpul-Termal-Residu
OPEX	97,601	103,563	133,541
CAPEX	16,444	24,667	41,111
<b>Total CAPEX dan OPEX</b>	<b>114,045</b>	<b>128,229</b>	<b>174,652</b>

### \*Catatan:

Pada perhitungan **skenario kumpul-angkut-buang** belum mempertimbangkan biaya pengadaan lahan, mengingat kecenderungan TPA akan lebih cepat penuh dan membutuhkan lahan untuk TPA baru dan belum mempertimbangkan biaya eksternalitas.



## Kegiatan Pembangunan 1

### Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan

Indikator:

1. Persentase Sampah yang dikelola – KLHK
2. Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM) - Kemenkes

#### Pro-P 1 Penguatan Kebijakan, Pendanaan, dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah

1. Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **(Kemendagri)**
2. Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan **(Kemendagri)**
3. Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) **(Kemendagri)**
4. Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat **(Kemendagri)**

#### Pro-P 2 Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persampahan

1. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) **(KLH)**
2. Pemantauan Data dan Informasi Sampah Laut **(KLH)**

#### Pro-P 3 Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengelolaan Sampah

1. Fasilitasi dan pembinaan bank sampah & kelompok masyarakat pengelola sampah **(KLH)**
2. Pembinaan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) **(KLH)**

#### Pro-P 4 Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah

1. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan **(BRIN)**
2. Pilot pengolahan sampah dengan teknologi WtE dan komposter dalam kerangka circular economy **(KLH)**
3. Pilot project skema insentif untuk pengelola persampahan dengan teknologi dalam kerangka circular economy **(KLH)**
4. Pilot pengelolaan E-Waste perkantoran **(KLH)**

#### Pro-P 5 Perubahan Perilaku Untuk Pemilahan Sampah

1. Satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup **(KLH)**
2. Pengembangan Kemitraan Lingkungan **(KLH)**
3. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Implementasi 5 Pilar STBM (HS-29) **(Kemenkes)**
4. Informasi Implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (HS-29) **(Kemenkes)**
5. Kelompok Masyarakat Mendapat Bantuan Implementasi dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan (HS-29) **(Kemenkes)**
6. Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih Layanan Publik terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (HS-29) **(Kemenkes)**
7. Apresiasi Insan Lingkungan **(KKP)**



## Kegiatan Pembangunan 2

### Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemresan Residu di TPA/LUR

#### Indikator:

1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah – KemenPU
2. TPA/LUR yang dioperasikan secara *sanitary landfill* / tingkat pengontrolan penuh – KemenPU
3. Volume penanganan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) – KKP

#### Pro-P 1 Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah

1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan **(KemenPU)**
2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat **(KemenPU)**
3. Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan **(KemenPU)**
4. Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Persampahan **(KemenPU)**
5. Fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular dan *energy recovery* **(KLH)**

#### Pro-P 2 Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

1. Penyusunan Peraturan dan NSPK Teknis Persampahan **(KemenPU)**
2. Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengaturan Pengelolaan Persampahan **(KemenPU)**

#### Pro-P 3 Pembinaan dan Pengawasan TPA Sanitary Landfill

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dengan Metode Landfill Mining **(KemenPU)**
2. Optimalisasi dan Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah **(KemenPU)**

#### Pro-P 4 Pengelolaan Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran **(KKP)**
2. Kampanye pencegahan sampah laut **(KKP)**
3. Fasilitasi kelembagaan pengelolaan sampah **(KKP)**
4. Rekomendasi Pencegahan Sampah Laut **(KKP)**
5. Prasarana Pengolah Sampah **(KKP)**
6. Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih **(KKP)**
7. Fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir **(KLH)**
8. Bantuan Sarana alat pengolah sampah **(KKP)**
9. Masyarakat Nelayan yang Diberikan Penyadaran Terhadap Penanganan Sampah Laut
10. Pelatihan pengolahan sampah untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil **(KKP)**

#### Pro-P 5 Penanganan Sampah dari Badan Air

1. Fasilitas Pemerintah daerah dalam Peningkatan Kualitas Air (Prokasih) **(KLH)**



## Kegiatan Pembangunan 1 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan

No	Rincian Output	PIC K/L	Mitra
<b>Pro-P 1 Penguatan Kebijakan, Pendanaan, dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah</b>			
1.	Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kemendagri	
2.	Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	Kemendagri	
3.	Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	Kemendagri	
4.	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkatkan	Kemendagri	
<b>Pro-P 2 Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persampahan</b>			
1.	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	KLH	
2.	Pemantauan Data dan Informasi Sampah Laut	KLH	
<b>Pro-P 3 Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengelolaan Sampah</b>			
1.	Fasilitasi dan pembinaan bank sampah & kelompok masyarakat pengelola sampah	KLH	
2.	Pembinaan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	KLH	

No	Rincian Output	PIC K/L	Mitra
<b>Pro-P 4 Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah</b>			
1.	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan	BRIN	
2.	Pilot pengolahan sampah dengan teknologi WtE dan komposter dalam kerangka <i>circular economy</i>	KLH	
3.	<i>Pilot project</i> skema insentif untuk pengelola persampahan dengan teknologi dalam kerangka <i>circular economy</i>	KLH	
4.	Pilot pengelolaan <i>E-Waste</i> perkantoran	KLH	
<b>Pro-P 5 Perubahan Perilaku Untuk Pemilahan Sampah</b>			
1.	Satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLH	
2.	Pengembangan Kemitraan Lingkungan	KLH	
3.	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Implementasi 5 Pilar STBM (HS-29)	Kemenkes	
4.	Informasi Implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (HS-29)	Kemenkes	
5.	Kelompok Masyarakat Mendapat Bantuan Implementasi dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan (HS-29)	Kemenkes	
6.	Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih Layanan Publik terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (HS-29)	Kemenkes	
7.	Apresiasi Insan Lingkungan	KKP	

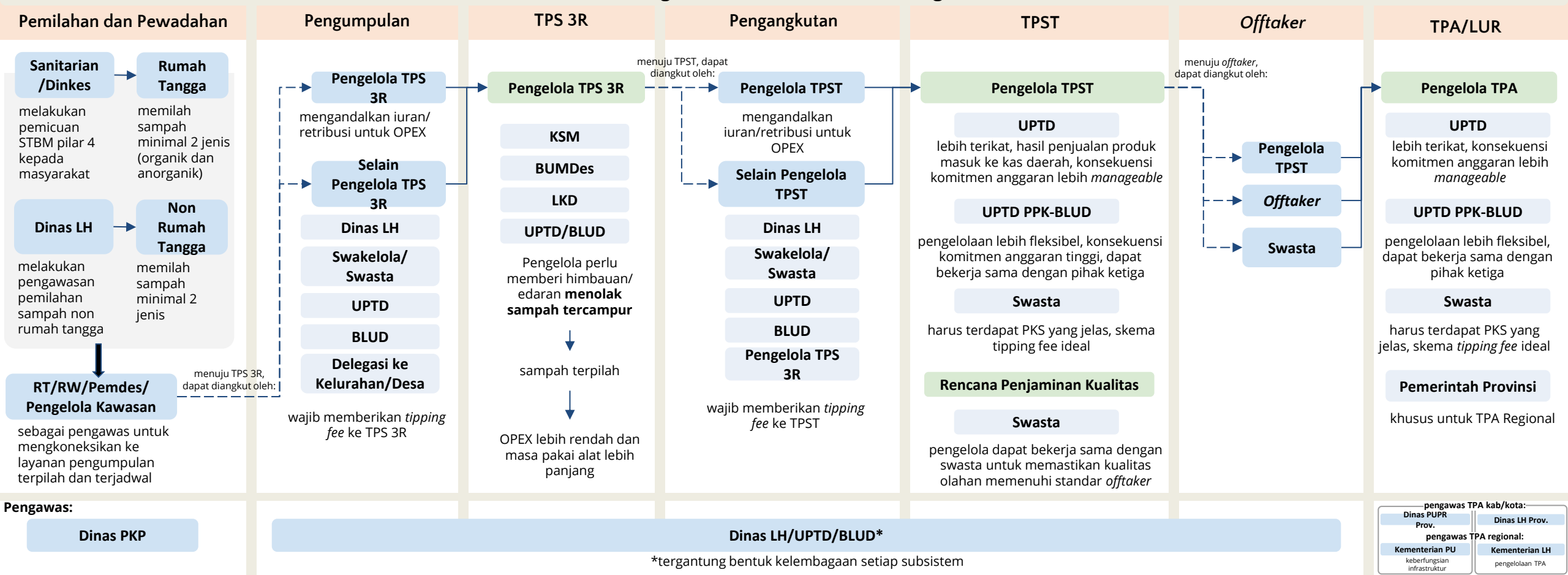


## Kegiatan Pembangunan 2 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR

No	Rincian Output	PIC K/L	Mitra
<b>Pro-P 1 Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah</b>			
1.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan	Kemen PU	
2.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Kemen PU	
3.	Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan	Kemen PU	
4.	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Persampahan	Kemen PU	
5.	Fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular dan <i>energy recovery</i>	KLH	
<b>Pro-P 2 Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah</b>			
1.	Penyusunan Peraturan dan NSPK Teknis Persampahan	Kemen PU	
2.	Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengaturan Pengelolaan Persampahan	Kemen PU	
<b>Pro-P 3 Pembinaan dan Pengawasan TPA Sanitary Landfill</b>			
1.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dengan Metode Landfill Mining	Kemen PU	
2.	Optimalisasi dan Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Kemen PU	

No	Rincian Output	PIC K/L	Mitra
<b>Pro-P 4 Pengelolaan Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>			
1.	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	KKP	
2.	Kampanye pencegahan sampah laut	KKP	
3.	Fasilitasi kelembagaan pengelolaan sampah	KKP	
4.	Rekomendasi Pencegahan Sampah Laut	KKP	
5.	Prasarana Pengolah Sampah	KKP	
6.	Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih		
7.	Fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir	KLH	
8.	Bantuan Sarana alat pengolah sampah	KKP	
9.	Masyarakat Nelayan yang Diberikan Penyadaran Terhadap Penanganan Sampah Laut	KKP	
10.	Pelatihan pengolahan sampah untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	KKP	
<b>Pro-P 5 Penanganan Sampah dari Badan Air</b>			
1.	Fasilitas Pemerintah daerah dalam Peningkatan Kualitas Air (Prokasih)	KLH	

# Rancangan Skema Hulu-Hilir Terintegrasi



## Hal-hal Kunci yang Perlu Dipastikan:

- |   |   |  |   |  |  |   |
|---|---|--|---|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya awal yang tinggi untuk wadah sampah terpilah</li> <li>Panduan pemilahan untuk pemucuan</li> <li>Kolektabilitas retribusi dilakukan satu pintu</li> <li>Memutakhirkan daftar wajib retribusi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki rute spasial dan dievaluasi berkala</li> <li>Standardisasi sarana pengumpulan</li> <li>Sarana dilengkapi dengan GPS tracking/minimal terdaftar</li> <li>Standar kompetensi pengendara (termasuk kemampuan pemahaman teknologi)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Input dan output sampah stabil</li> <li>Pengolahan sampah memenuhi kapasitas desain</li> <li>Tidak ada penumpukan sampah</li> <li>Pembinaan operasional teknis dari Dinas PU secara rutin</li> <li>Pemantauan rutin keberfungsian sarana</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki rute spasial dan dievaluasi berkala</li> <li>Standardisasi sarana pengumpulan</li> <li>Sarana dilengkapi dengan GPS tracking/minimal terdaftar</li> <li>Standar kompetensi pengendara (termasuk kemampuan pemahaman teknologi)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Input sampah terpilah/minimal terpisah dari sampah organik</li> <li>Input dan output sampah stabil</li> <li>Ketersediaan suku cadang</li> <li>Penetapan jam kerja sesuai kapasitas desain</li> <li>Keandalan mesin</li> <li>Pencatatan real-time</li> <li>Ketersediaan SDM yang memahami manajemen pabrik</li> <li>Pemantauan rutin keberfungsian sarana</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu memperhatikan jarak antara TPST dengan oftaker mengingat berdampak pada biaya transportasi (Rp/ton)</li> <li>Pemilihan oftaker harus didasarkan dengan karakteristik olahan sampah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya operasional untuk <i>sanitary landfill</i></li> <li>Sampah yang masuk hanya residu</li> <li>Pengawasan pengelolaan TPA khususnya terhadap standar baku mutu lingkungan dari hasil pengolahan material di TPA</li> <li>Tingkat pengontrolan TPA minimal aman</li> </ol> |
|---|---|--|---|--|--|---|



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# TERIMA KASIH

